

# FENOMENA URBANISASI PASCA- HARI RAYA IDULFITRI

Herlina Astri Purnamaraya\*)



## Abstrak

*Meningkatnya aktivitas urbanisasi pasca-Idulfitri menimbulkan berbagai permasalahan sosial di kota besar. Permasalahan kesenjangan pembangunan dan kesempatan kerja antara perkotaan dan perdesaan menjadi motivasi utama terjadinya urbanisasi. Selain itu, para urban tergiur keberhasilan pendahulunya dan berharap mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya di kota. Namun, mereka yang tidak memiliki keahlian akan kesulitan mencari pekerjaan di perkotaan, sehingga menimbulkan beban bagi kota yang menampungnya. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah yang tegas dalam membatasi urbanisasi demi kesejahteraan penduduk.*

## A. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan salah satu masalah sosial yang semakin serius bagi beberapa wilayah kota besar di Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dan kota menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup memprihatinkan. Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memperkirakan, arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota pasca-Lebaran 2013 mencapai satu juta orang. Selain Jakarta yang menjadi tujuan utama urbanisasi, kota-kota besar lain di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Batam, juga menjadi tujuan urbanisasi saat ini.

Munculnya niat untuk pindah dari desa ke kota, umumnya sangat dipengaruhi oleh ajakan, kesalahan menerima informasi media massa, impian pribadi, terdesak kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Namun demikian, penarik urbanisasi yang paling kuat adalah berupa ajakan yang biasanya disertai dengan janji-janji semu. Ajakan ini dapat berasal dari seseorang yang mudik ke kampung halaman pada hari raya Idulfitri. Hal ini dilakukan dengan memamerkan uang dan barang yang dibawanya dari kota. Bahkan tidak jarang mereka suka menceritakan tentang kehidupan kota yang megah, gemerlap, dan mudah mendapatkan uang. Pada akhirnya orang yang mendengarkan akan beranggapan

\*) Peneliti bidang Kerja Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: herlina.astri@gmail.com



bahwa kota besar sangat mengagumkan, menyenangkan, dan nyaman untuk didatangi.

Sangat disayangkan, mereka yang diajak ke kota besar mayoritas tidak atau belum memiliki keahlian untuk bekerja. Hal yang sering terjadi, mereka datang untuk mengadu nasib, tanpa memikirkan situasi dan kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Dikhawatirkan, keberadaan mereka justru menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru, seperti menjadi pedagang liar, penghuni kampung kumuh, pengemis, gelandangan, dan sebagainya.

## **B. Peralihan Asumsi Masyarakat**

Umumnya di perdesaan, penduduk bercocok tanam, beternak, atau melakukan berbagai pekerjaan yang dapat digolongkan sebagai petani. Petani merupakan salah satu sosok wirausaha, yang diasumsikan sebagai orang yang mempunyai objek usaha, peralatan, dan keahlian sehingga hasilnya juga langsung dinikmati individu yang bersangkutan. Berbeda dengan perkotaan yang banyak dipenuhi oleh pekerja, di mana mereka hanya memberikan kontribusi tenaga dan keahlian kepada yang memberi pekerjaan dengan mengharapkan imbalan atau upah.

Fenomena urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tampaknya lebih senang menjadi pekerja daripada berwirausaha. Peralihan ini semakin meningkat, yaitu dari bekerja untuk diri sendiri menjadi bekerja untuk orang lain dengan menerima upah atau gaji. Bertani lalu dianggap bukan sebagai lapangan pekerjaan yang menjanjikan hasil yang pasti, tetap, dan memuaskan bagi masyarakat desa. Bertani mempunyai risiko gagal panen atau harga hasil panen anjlok. Dan saat ini makin diperparah dengan terjadinya kelangkaan bibit, pupuk dan pestisida, serangan beras impor, musibah kekeringan, banjir atau serangan hama wereng, dan sebagainya.

Hasil pertanian juga selalu menjadi bahan spekulasi sehingga hanya menguntungkan para tengkulak. Tenaga, modal, dan waktu yang telah dikorbankan dianggap tidak sepadan dengan hasilnya. Sehingga jika mendengar kata “petani” maka yang terbayang adalah

sosok yang miskin dan tinggal di tempat kumuh. Akhirnya petani dikategorikan sebagai pekerjaan “kasta” terbawah. Kondisi tersebut menyebabkan para pemuda desa menganggap bertani bukanlah sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Apalagi jika mereka mendengar tentang keberhasilan para pemudik dari kota, maka dorongan urbanisasi itu makin kuat.

Kehidupan kota yang modern juga menjadi salah satu daya tarik seseorang melakukan urbanisasi. Kehidupan perkotaan tentu sangat bertolak belakang dengan kehidupan perdesaan. Perkotaan juga mempunyai sarana dan prasarana lebih lengkap seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, hiburan dan sebagainya. Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih beragam juga menjadi daya tarik seseorang melakukan urbanisasi. Berbeda dengan perdesaan di mana lapangan pekerjaan sangat terbatas, walaupun ada penghasilan yang diperoleh tidak sebesar penghasilan bekerja di kota. Hal ini dapat ditinjau dari kehidupan perdesaan yang rata-rata bergerak di sektor agraris, yang tidak banyak membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan proses produksinya. Selain itu, asumsi masyarakat untuk meraih impian menjadi orang sukses dengan bekerja di kota makin menguatkan terjadinya urbanisasi. Perkotaan dianggap memberikan peluang cukup besar untuk mewujudkan impian tersebut.

## **C. Dampak Urbanisasi terhadap Lingkungan Kota**

Meningkatnya proses urbanisasi, seperti yang dapat dilihat di Jakarta, menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan, baik dari segi tata kota, masyarakat, maupun keadaan sosial sekitarnya. Dampak urbanisasi yang terjadi di Jakarta, antara lain:

### **1. Dampak Tata Kota**

Pertambahan penduduk kota yang “dipaksa terjadi” begitu pesat akan sulit diikuti kemampuan daya dukung kota Jakarta. Saat ini, lahan kosong di Jakarta sangat jarang ditemui. Sarana dan prasarana yang telah ada seperti Ruang Terbuka Hijau dan trotoar bagi pedestrian beralih fungsi

menjadi ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan baik yang di tengah kota maupun yang di pinggiran kota seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian yang legal maupun ilegal. DAS yang seharusnya bermanfaat untuk menyerap air hujan justru menjadi penyebab terjadinya banjir karena tidak dapat lagi menampung air hujan. Bencana alam seperti banjir dapat terjadi dengan cepat begitu hujan turun dengan volume yang besar.

## 2. Dampak Kesehatan

Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik dengan tujuan mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan, umumnya memiliki kendaraan. Pertambahan volume kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang membanjiri Jakarta secara terus-menerus menyebabkan kemacetan terjadi di ruas-ruas jalan di ibu kota. Berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara bagi telinga manusia merupakan dampak dari urbanisasi yang mengganggu kondisi kesehatan masyarakat.

## 3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pergerakan penduduk daerah lain ke Jakarta untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah apabila penduduk yang datang mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan. Namun, kenyataannya banyak di antara mereka yang datang ke Jakarta tanpa memiliki keterampilan kecuali bertani. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian, penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan pekerjaan lain yang sejenis. Bahkan masyarakat yang gagal memperoleh pekerjaan memilih atau terpaksa tinggal di kota dan menjadi tunakarya, tunawisma, dan tunasusila.

Dari ketiga dampak tersebut, umumnya urbanisasi memang berimplikasi pada

ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kota dengan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana kota. Salah satu contoh adalah penyediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi penduduk di Kota Jakarta. Persoalan ini tidak terlepas dari dinamika yang terjadi baik dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola perumahan dan permukiman. Kebijakan yang telah dibuat pada prinsipnya bertujuan untuk pemerataan pengembangan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat terus menerus, sebab pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung, serta dampak akibat pembangunan tersebut.

Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, di samping dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan, serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Selama ini pembangunan perumahan dan permukiman kurang diperhatikan dibandingkan dengan pembangunan kawasan industri dan pertokoan.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dapat digarisbawahi, permasalahannya selain menyangkut fisik perumahan dan permukiman juga terkait dengan penataan ruang. Di dalamnya termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan, serta perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya urbanisasi.

Untuk ke depan, diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan, serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap pencapaian penataan ruang yang disusun

secara transparan dan partisipatif serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Dengan demikian diharapkan akan terwujud permukiman yang dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan penghuninya, baik di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu lainnya.

## D. Penutup

Masalah utama yang menjadi pemicu meningkatnya urbanisasi adalah keinginan untuk mengubah keadaan hidup menjadi lebih baik, dan pandangan masyarakat bahwa kehidupan masyarakat perkotaan lebih baik dari pada kehidupan masyarakat di perdesaan. Hal ini menyebabkan urbanisasi besar-besaran tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sehingga terjadi peningkatan pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya di kota besar.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan akibat urbanisasi menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya level persaingan di kota besar menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Tidak adanya keahlian dan sedikitnya kaum pendatang yang memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha di kota mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminalitas.

Terbatasnya tempat tinggal mengakibatkan munculnya banyak rumah kumuh tidak layak huni yang membuat tata letak kota menjadi berantakan dan tidak tertata dengan baik. Apalagi banyak pendatang yang kemudian mendirikan gubuk-gubuk liar di pinggiran sungai dan rel kereta api yang merupakan daerah hijau yang tidak boleh ditempati. Para pendatang tentunya akan menghadapi tantangan atau hambatan untuk hidup di kota. Mereka akan bersaing dengan masyarakat kota, dan tentu juga dengan sesama pendatang. Gaya hidup masyarakat perkotaan yang individualis, diakibatkan oleh persaingan yang ketat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang membuat mereka tidak peduli dengan sesamanya.

Beberapa solusi agar urbanisasi dapat diminimalisir adalah dengan mengendalikan arus urbanisasi baik yang dilakukan oleh

pemerintah kota maupun pemerintah desa, terutama pada momen pasca-hari raya Idulfitri. Momen pasca-hari raya merupakan momen yang paling sering dimanfaatkan untuk berurbanisasi. Perlu diadakan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan urbanisasi. Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan operasi yustisi karena dinilai tidak efektif untuk mengurangi urbanisasi. Harus ada peraturan yang tegas, terutama di daerah kota tujuan urbanisasi tentang tata kota dan kependudukan.

Perlu ditanamkan rasa cinta kepada kampung halaman semenjak kecil. Perlu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, saluran irigasi, sekolah, puskesmas dan pasar. Perlu pengenalan dan pemanfaatan teknologi sederhana dan tepat guna di sekitar daerah-daerah perdesaan. Perlu kebijakan dari pemerintah, di antaranya bantuan kredit untuk investasi atau modal bagi masyarakat perdesaan untuk membuka usaha di daerah masing-masing. Upaya tersebut akan memperluas dan mengembangkan lapangan kerja dan tingkat pendapatan di perdesaan, sehingga dorongan penduduk desa untuk berurbanisasi ke kota dapat berkurang.

## Rujukan:

1. "Jumlah Urbanisasi Meningkat Pasca Mudik," <http://rri.co.id/index.php/berita/65038/>, diakses 13 Agustus 2013.
2. "Muhaimin: Urbanisasi Usai Lebaran Diprediksi Capai 1 Juta Jiwa," <http://nasional.tvonenews.tv/berita/view/73458/2013/08/12/>, diakses 13 Agustus 2013.
3. "50 Ribu Pendatang Serbu Jakarta Pasca Lebaran," <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/31/058501190/>, diakses 13 Agustus 2013.
4. "Sentralisme ekonomi, suburkan urbanisasi," <http://www.bekasikota.go.id/read/11415/>, diakses 13 Agustus 2013.
5. "Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)," [http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen\\_217\\_2002.pdf](http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/kepmen/kepmen_217_2002.pdf), diakses 26 Agustus 2013.